

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN *RESIDIVIS* (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)

Oleh
Thessaloniq Clara Syebat Simbolon

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengedepankan pembinaan sebagai upaya memulihkan narapidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak pidana. Pembinaan narapidana perempuan memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan narapidana laki-laki, mengingat narapidana perempuan memiliki karakteristik dan kerentanan yang khas, seperti latar belakang trauma berbasis gender, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial yang lebih berat. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mencegah *residivis*, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembinaan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Narasumber terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Narapidana *Residivis*, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana perempuan dalam rangka mencegah *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung secara umum telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni mencakup pembinaan kerohanian, kepribadian, dan kemandirian yang didukung oleh pendekatan *consistency approach*, *ethic of care*, dan *gender security*. Namun, karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pembinaan narapidana *residivis*, maka pembinaan yang diberikan masih bersifat seragam dan belum mengakomodasi kebutuhan spesifik narapidana *residivis* perempuan secara optimal, sehingga prinsip individualisasi pembinaan belum sepenuhnya diterapkan. Terdapat lima faktor penghambat yang bersifat saling berkaitan, yaitu belum adanya regulasi khusus yang mengatur pembinaan narapidana *residivis* perempuan,

Thessaloniq Clara Syebat Simbolon

ketidakseimbangan rasio petugas dan narapidana serta keterbatasan petugas perempuan yang kompeten di bidang pembinaan berbasis gender, keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung program pembinaan, stigma sosial dan penolakan keluarga yang menjadi hambatan utama reintegrasi sosial pascabebas, serta nilai budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penerimaan kembali mantan narapidana perempuan di lingkungan sosial.

Saran penelitian ini adalah pertama, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur pembinaan narapidana *residivis* perempuan berbasis risiko dan kebutuhan individual sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kedua, lembaga pemasyarakatan perlu meningkatkan kapasitas petugas perempuan, sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran pembinaan, sekaligus memperkuat kemitraan dengan pihak eksternal.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Perempuan, *Residivis*.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FEMALE INMATES' REHABILITATION AT CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF RECIDIVISM PREVENTION (A Study at the Class IIA Women's Correctional Institution of Bandar Lampung)

**By
Thessaloniq Clara Syebat Simbolon**

The correctional system in Indonesia prioritizes rehabilitation as an effort to reintegrate inmates into society as responsible citizens who do not reoffend. The rehabilitation of female inmates requires a distinct approach compared to that of male inmates, given that female inmates possess unique characteristics and vulnerabilities, including gender-based trauma backgrounds, economic dependency, and heavier social stigma. The issues examined in this study concern how the rehabilitation of female inmates is carried out at correctional institutions in efforts to prevent recidivism, as well as the factors that impede the implementation of such rehabilitation at the Class IIA Women's Correctional Institution of Bandar Lampung

This study employs both normative juridical and empirical juridical approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary data sources. Informants consisted of the Head of the Class IIA Women's Correctional Institution of Bandar Lampung, recidivist inmates, and a lecturer in the Department of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. Data were collected through library research and fieldwork in the form of in-depth interviews, and subsequently analyzed qualitatively to produce a comprehensive description of the issues under investigation.

The findings indicate that the rehabilitation of female inmates in the context of recidivism prevention at the Class IIA Women's Correctional Institution of Bandar Lampung has, in general, been carried out in accordance with applicable regulations, encompassing spiritual, personality, and independence development programs supported by a consistency approach, an ethic of care, and gender security principles. Nevertheless, due to the absence of specific regulations governing the rehabilitation of recidivist inmates, the programs provided remain uniform and have yet to optimally accommodate the specific needs of female recidivist inmates, resulting in the principle of individualized rehabilitation not being fully applied. Five interrelated inhibiting factors were identified: the absence

Thessaloniq Clara Syebat Simbolon

of specific regulations governing the rehabilitation of female recidivist inmates, an imbalance in the staff-to-inmate ratio coupled with a shortage of female officers competent in gender-based rehabilitation, limited budgets and insufficient supporting facilities for rehabilitation programs, social stigma and family rejection as primary barriers to post-release social reintegration, and prevailing cultural values within the community that have yet to fully support the reacceptance of former female inmates into the social environment.

The recommendations of this study are, first, that the government, through the Directorate General of Corrections and the Ministry of Immigration and Corrections, should formulate specific regulations governing the risk- and needs-based rehabilitation of female recidivist inmates as derivative regulations under Law Number 22 of 2022 on Corrections. Second, correctional institutions should enhance the capacity of female officers, improve infrastructure and facilities, and increase the allocation of rehabilitation budgets, while simultaneously strengthening partnerships with external stakeholders.

Keywords: Rehabilitation, Female Inmates, Recidivism.